



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

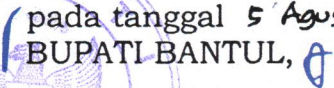
BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

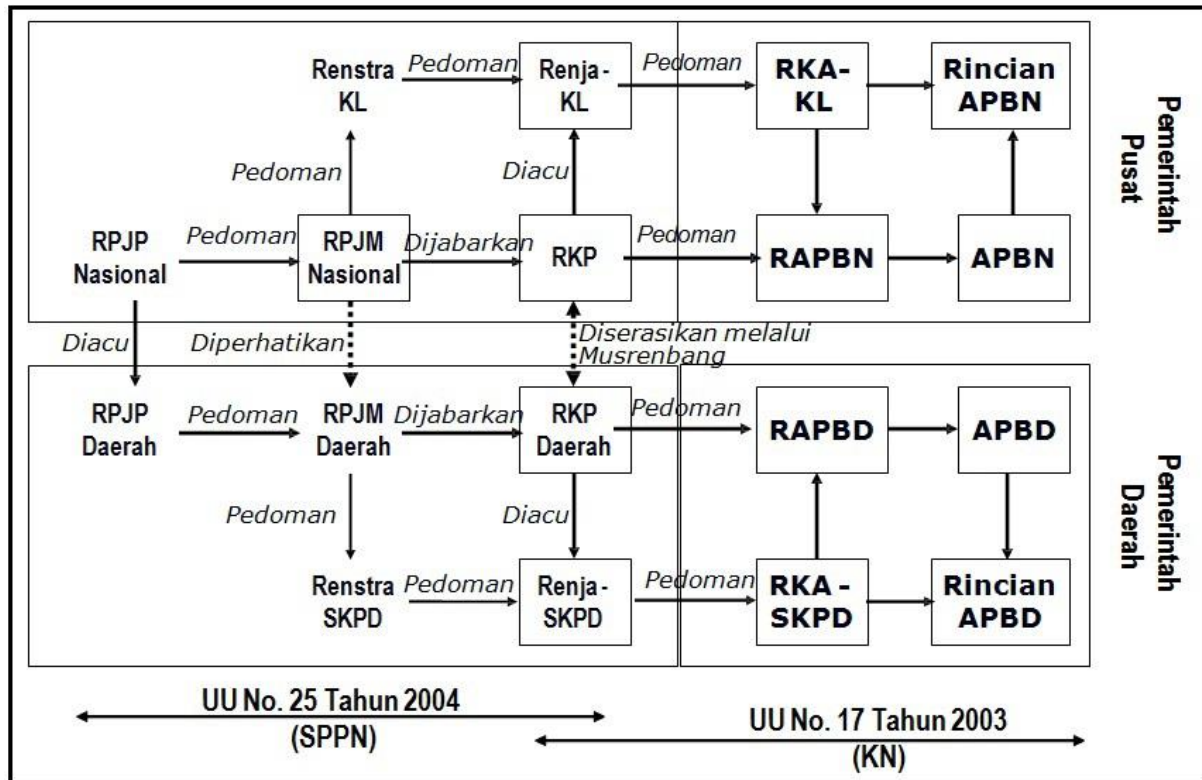
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
8.01.001 .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAKIP	88	87.98	86	89	103,5	87	88	100
0201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra Renja	4	4	4	4	100	4	12	300
02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	n/a		n/a					
02.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKj	1	1	1	1	100	1	3	300
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100
02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai	240 ob	240	288 ob	288	100	245	773	322
		Pembaayaran Tunjangan Pegawai								

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
		prasarana aparatur								
02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	18 unit	300
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95	95	80 %	100	125	100	100	100
02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia	300 lbr	300	300	300	100	300	900	300
02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 bln	300
02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN	24 bln	24 bln	24 bln	24 bln	100	24 bln	72 bln	300
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang	16 unit	16	14 unit	15 unit	107	16 unit	47 unit	293
		Pajak STNK	16 unit	16 unit	14 unit	15 unit	107	16 unit	47 unit	293
02.09.5	Pemeliharaan Mebel	Servis Mebelair	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	100	34 unit	102 unit	300
02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon dan Servis Computer	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100	22 unit	66 unit	300
02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan dan pembuatan kamar mandi gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	300
8.01.002	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
8.01.002 .02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
8.01.002. 02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawasan Kebangsaan	500 orang	500 orang	950 orang	950 orang	100%	1250 orang	2700 orang	540
8.01.003	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kalurahan dalam pemahaman demokrasi	100 %	100%	84 %	84 %	100	85 %	85 %	100 %
8.01.003 .02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat dalam kegiatan demokrasi	100 %	100%	84%	84 %	100	85 %	85 %	100 %
8.01.003. 02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos	900 orang	900 orang	2800 orang	2800 orang	100 %	1500 orang	5200orang	577

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah									
8.01.004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM	33 %	33 %	23 %	35%	152	28%	33 %	100
8.01.004 .02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM	33 %	33 %	23 %	35%	152	28%	33 %	100
8.01.004. 02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas, orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas,Orsos dan LSM	350 orang	350 orang	250 orang	350 orang	140	300 orang	1000 orang	285
8.01.005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Aktif	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8.01.005 .02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif	100%	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8.01.005. 02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar	1250 orang	1250 orang	3060 orang	3060 orang	100	2500 orang	6810 orang	544

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*	(11) = (10/4)
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba								
8.01.006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase FKDM tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8.01.006 .02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase FKDM tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8.01.006. 02.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100	200 orang	600 orang	300
08.01.00 6.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	350 orang	350 orang	300 orang	300 orang	100 %	350 orang	1050 orang	350
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	50 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100	100 orang	250 orang	500

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
		Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
2:22	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lokasi yang diprakondisi	33 %	33 %	16,67 %	16,67 %	100	25 %	25 %	33
02.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)	Lokasi yang diprakondisi	33 %	33 %	16,67 %	16,67 %	100	25 %	25 %	33
02.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	3 lap	300

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	NIHIL	NIHIL

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Komitmen Pimpinan dan semangat Tim dalam melaksanakan kegiatan ini
1.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Komitmen Pimpinan dan semangat Tim dalam melaksanakan kegiatan ini
1.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesadaran Masyarakat, Dukungan Akademisi, Semangat Nasionalisme, Komitmen Tokoh-tokoh Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Komitmen Pimpinan dan seluruh Tim Pelaksana

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan juga dukungan dari stekaholder terkait
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Komitmen Pimpinan dan seluruh Tim Pelaksana Kegiatan juga dukungan dari stekaholder terkait
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sinergitas dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Dukungan Legislatif, Dukungan Akademisi.
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Adanya kerja sama yang baik dengan Ormas
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
4.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	- Adanya Perbup No 11 Tahun 2021 Tentang P4GN dan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prekursor Narkotika, - Dukungan Tokoh Agama yang aktif
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
5.1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dukungan OPD yang mempunyai kegiatan untuk meminta rumusan kebijakan teknis dan guna penanganan konflik di masyarakat.
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Hubungan Lintas Organik Intelijen yang mantap
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komitmen Pimpinan dan kerjasama yang baik antara bidang dan sekretariat
6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati .
6.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedia tenaga Perencana
6.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Telah terlaksana penyusunan RKA –SKPD tahun 2024
6.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan dari seluruh Tim Keuangan di Bakesbangpol
6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sama yang baik semua karyawan/wati
6.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
6.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir Tahun SKPD	Dukungan dari seluruh Tim Keuangan di Bakesbangpol
6.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Dukungan dari seluruh Tim Keuangan di Bakesbangpol
6.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
6.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia komponen listrik
6.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia ATK, Alat dan bahan pembersih
6.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan dan Foto Copy
6.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan Bacaan Koran
6.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Material	Tersedia tanaman hias dan Fandel
6.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penerimaan Tamu dari OPD lain
6.3.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penerimaan Tamu dari OPD lain
6.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
6.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana Pembelian Printer Scan
6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
6.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedia Meterai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana pembayaran rekening telepon dan Listrik
6.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksana pembayaran Honor Non ASn
6.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
6.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia BBM operasional dan Sukucadang kendaraan dinas
		Pajak STNK kendaraan Dinas
6.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksana Pemeliharaan Mebelair
6.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana servis AC, Komputer, Sound dan Printer
6.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan Gedung kantor

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan Politik;
2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama;
3. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan;
4. Melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah terkait kondisi kerukunan masyarakat;
5. Mensosialisasikan bahaya Narkoba.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Pemilih yang berpartisipasi dengan capaian IKU 107 %	80.32	76	80.32	77	78	78	Dilaksanakan pada tahun 2020 Pemilukada, sesuai target yang telah tercapai dengan nilai sangat tinggi sebesar 107 %
2	Jumlah intoleransi di masyarakat dengan Capaian IKU 100 %	0	0	0	0	0	0	Intoleransi juga mendapatkan nilai yang tinggi sesuai dengan target kita 0 atau 100 %
3	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan dengan Capaian IKU 100 %	0	0	0	0	0	0	Kejadian Konflik dimasyarakat juga mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan bahwa IKU ini dapat berhasil dengan nilai yang tinggi

Sesuai pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU yang tidak memenuhi target adalah: NIHIL
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Nihil
2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Persentase Pemilih yang berpartisipasi
 - b. Jumlah intoleransi di masyarakat
 - c. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikanIKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terkoordinasikannya semua Tim Terpadu yang ada di Bakesbangpol Bantul sehingga dapat menyelesaikannya semua gejolak yang terjadi di daerah dengan menyelesaikan kasus di tingkat kalurahan atau Kapanewon dengan musyawarah;
 - b. Kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di Kabupaten Bantul sehingga tercipta kondusifitas yang stabil;
 - c. Semakin bertambah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi mulai dari pemilihan Lurah sampai dengan pemilihan Presiden.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Dengan masih kurangnya penguasaan IT bagi karyawan perlu diikutkan dalam pelatihan yang dapat meningkatkan SDM
2. Meningkatkan Pendidikan Politik bagi di seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak dapat berjalan lancar
3. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan

4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder agar tercipta kondusifitas yang stabil
5. Mensosialisasikan bahaya Narkoba bagi masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Terkoordinasikannya semua stekholder selaku pemangku kepentingan.	Belum tersedianya Karyawati yang cukup menguasai IT
Belum tersedianya Karyawati yang cukup menguasai IT	Banyak Sarpras yang sudah tidak relevan dengan perkembangan IT
Banyak Sarpras yang sudah tidak relevan dengan perkembangan IT	Sumberdaya manusia yang ada belum memadai baik kualitas dan kuantitas
Jadwal Pelaksanaan yang sering terhambat dengan karena terbentur dengan kegiatan lain	Jadwal Pelaksanaan yang sering terhambat dengan karena terbentur dengan kegiatan lain

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.	Masih adanya indikasi politik uang di masyarakat
Stabilitas keamanan lingkungan di masyarakat cukup kondusif	Adanya potensi konflik berbasis SARA
Semakin tinggi pendidikan masyarakat	Adanya perubahan budaya dan pola pikir masyarakat yang cepat dan dinamis

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dengan masih kurangnya penguasaan IT bagi karyawan perlu diikutkan dalam pelatihan yang dapat meningkatkan SDM;
2. Meningkatkan Pendidikan Politik bagi di seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak dapat berjalan lancar;
3. Meningkatkan peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan steakholder agar tercipta kondusivitas yang stabil.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	88	3.595.777.555	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	88	3.679.598.498	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Perencanaa, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	27.300.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya, Renstra, Proses bisnis, Renja, RKA	n/a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya, Renstra, Proses bisnis, Renja, RKA	n/a		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	25.000.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	18.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	Tersusunnya Rancangan RKA	n/a		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	Tersusunnya Rancangan RKA	n/a		
			LAKIP	n/a				LAKIP	n/a		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	8.450.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja Perangkat Daerah	100	2.950.677.555	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja Perangkat Daerah	100	2.949.302.826	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN	n/a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN	n/a		
			Pembayaran TPP ASN	n/a				Pembayaran TPP ASN	n/a		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/bulan	2.795.777.555			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/bulan	2.827.392.826	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan CALK,Laporan Keuangan,Lap. Prognosis	n/a		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan CALK,Laporan Keuangan,Lap. Prognosis	n/a		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 dokumen	105.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	94.260.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan Evaluasi Renja	n/a		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan Evaluasi Renja	n/a		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 dok	49.900.000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	27.650.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	199.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	273.287.230	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.737.010			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.012.520	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	22.000.000			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	36.336.510	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	20.737.075			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	18.313.200	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah bahan bacaan	12	3.000.000			Jumlah bahan bacaan	12	2.400.000	
	Penyediaan Bahan /Material		Jumlah paket bahan/materia			Penyediaan Bahan /Material		Jumlah paket bahan/materia	1 paket	11.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			1 yang disediakan					1 yang disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	n/a		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	n/a		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440 lap	130.000.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	184.725.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap	21.125.915	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap	15.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	96.100.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain		Jumlah belanja modal barang	n/a		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain		Jumlah belanja modal barang	n/a		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	6	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	96.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	53.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	59.482.392	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,800,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	48.200.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	53.482.392	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	267.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	274.126.050	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bantul	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	100 persen	2.400.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bantul	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	100 persen	2.617.197.650	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	100 persen	2.400.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	100 persen	2.617.197.650	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	900 orang	2.400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	900 orang	2.617.197.650	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			Jumlah intoleransi di masyarakat	0				Jumlah intoleransi di masyarakat	0		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Cakupan Pembinaan Ormas	33 Persen	125.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Cakupan Pembinaan Ormas	33 Persen	416.683.100	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan Ormas	33 Persen	125.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan Ormas	33 Persen	416.683.100	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	350 orang	125.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	500 orang	416.683.100	

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Kerukunan Antar Umat Beragama	100 persen	400.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Kerukunan Antar Umat Beragama	100 persen	825.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		FKUB Aktif	100 Persen	400.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		FKUB Aktif	100 Persen	825.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1250 orang	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1250 orang	825.000.000	
			Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0				Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penanganan permohonan pengkondisia n masyarakat yang diminta oleh PD	100%	409.446.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penanganan permohonan pengkondisia n masyarakat yang diminta oleh PD	100%	263.280.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	100%	409.446.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun	100%	263.280.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	200 orang	170.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	1 dokumen	12.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350 orang	189.446.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350 orang	194.280.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	50 orang	50,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1 dokumen	57.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Cakupan Lokasi yang diprakondisi	25 persen	645.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Cakupan Lokasi yang diprakondisi	25 persen	299.305.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)		Lokasi yang diprakondisi	25 persen	645.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)		Lokasi yang diprakondisi	25 persen	299.305.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 lap	645.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 lap	299.305.000	
					7.975.223.555					8.846.064.248	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bantul	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Paket	Pokir
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bantul	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15 Paket	Pokir

narkotika di masyarakat mempunyai tugas pokok untuk memberikan sosialisasi maupun penyuluhan pencegahan bahaya Narkotika ini guna mensukseskan Bantul Bebas Narkoba tahun 2025. Besar dukungan dari masyarakat terutama pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi remaja menjadi tanggung jawab kita bersama.

Ideologi Pancasila sebagai dasar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting untuk digaungkan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan adanya berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan masuknya budaya luar melalui perkembangan IT yang semakin modern melalui Bumi dharmawangsa yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati Bantul sebagai kegiatan Unggulan di Bakesbangpol Kabupaten Bantul dalam mengaungkan nilai-nilai Pancasila.

Dengan perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks peningkatan pemberdayaan Organisasi masyarakat yang berada di tengah masyarakat dapat menjadi benteng dalam menjaga kondusifitas di masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilukada	80.32	80.32	77	77
		Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	0
			Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	0	0	0	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						8.846.064.248,00							10.739.000.000,00		
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						299.305.000,00								300.000.000,00	
		2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						299.305.000,00								300.000.000,00	
1	2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	-			25 persen	299.305.000,00						-	300.000.000,00		
	2	22	8	5.1		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Lokasi yang diprakondisi	-			25 persen	299.305.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di Bantul	-	300.000.000,00		
	2	22	8	5.1	18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya															
							Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				1 Dokumen	299.305.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di Bantul		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						8.546.759.248,00							10.439.000.000,00		
	8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8.546.759.248,00							10.439.000.000,00		
2	8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-			88 angka	3.679.598.498,00						-	4.259.000.000,00		
	8	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	27.300.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	50.000.000,00		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah								
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	8	1	1	2	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18.850.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	1	1	2	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	8.450.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	1	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	-			100 persen	2.949.302.826,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	3.185.000.000,00					
	8	1	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240 Orang/bula n	2.827.392.826,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.012.520,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	36.336.510,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	18.313.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	11.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
															Peningkatan SDM Berdaya Saing									
	8	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	184.725.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
															Peningkatan SDM Berdaya Saing									
	8	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	96.100.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	150.000.000,00					
															Peningkatan SDM Berdaya Saing									
	8	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	96.100.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
															Peningkatan SDM Berdaya Saing									
	8	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	59.482.392,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	75.000.000,00					
															Peningkatan SDM Berdaya Saing									
	8	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
															Peningkatan SDM Berdaya Saing									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM <				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																	Peningkatan SDM Berdaya Saing				
	8	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	24.550.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	1	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				1 Unit	47.716.800,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	-			100 persen	745.000.000,00						-	2.400.000.000,00		
	8	1	2	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	-			100 persen	745.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	2.400.000.000,00		
	8	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	745.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	-			100 persen	2.617.197.650,00						-	2.500.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	-			100 persen	2.617.197.650,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	2.500.000.000,00	
	8	1	3	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				900 Orang	2.617.197.650,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
															Peningkatan SDM Berdaya Saing					
5	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	-			33 persen	416.683.100,00						-	250.000.000,00	
	8	1	4	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Ormas	-			33 persen	416.683.100,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	250.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Peningkatan SDM Berdaya Saing					
	8	1	4	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	416.683.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM <					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1250 Orang	825.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
																Peningkatan SDM Berdaya Saing				
7	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	-			100 persen	263.280.000,00						-	580.000.000,00	
	8	1	6	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	-			100 persen	263.280.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	580.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																	Peningkatan SDM Berdaya Saing				
	8	1	6	2	2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
								Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2	4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				350 Orang	194.280.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
																Peningkatan SDM Berdaya Saing						
	8	1	6	2	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
																Peningkatan SDM Berdaya Saing						
	J U M L A H											8.846.064.248,00								10.739.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP.MM
NIP.196512261986021001